



## Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020

Lia Hanifa<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

\*Korespondensi: [um.buton@gmail.com](mailto:um.buton@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 03  
November 2021

Disetujui 28  
November 2021

Dipublikasikan 29  
November 2021

Keywords:  
Analisis Kinerja,  
Analisis  
Pendapatan,  
Analisis Belanja

© 2021 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif untuk perhitungan analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 5 (lima) tahun terakhir, mengalami perkembangan yang cukup baik. Untuk analisis kinerja pendapatan dengan analisis varian tergolong baik, namun untuk analisis derajat desentralisasi, ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah masih rendah dan perlu ditingkatkan, walaupun analisis efektifitas pendapatan tergolong sangat efektif. Hasil analisis untuk kinerja belanja daerah dari sisi varians belanja, pertumbuhan belanja dan keserasian belanja dikatakan baik dan serasi atau seimbang dalam mengalokasikan belanja daerah karena alokasi belanja operasional lebih besar daripada belanja modal. Sedangkan tingkat rata-rata efisiensi belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2016–2020 sebesar 93% yang tergolong cukup efisien.

### Abstract

The purpose of this study is to analyze the performance of the regional revenue and expenditure budget (APBD) of Southeast Sulawesi Province from 2016 to 2020. The method used is descriptive analysis using quantitative analysis techniques for calculating revenue performance analysis and regional government expenditure performance analysis. The results of the study indicate that the development of regional income and expenditure in Southeast Sulawesi Province in the last 5 (five) years, has developed quite well. For the analysis of income performance with analysis of variance, it is classified as good, but for the analysis of the degree of decentralization, dependence and regional financial independence is still low and needs to be improved, although the analysis of income effectiveness is classified as very effective. The results of the analysis for regional expenditure performance in terms of expenditure variance, expenditure growth and expenditure compatibility are said to be good and harmonious or balanced in allocating regional expenditures because the allocation of operational expenditures is greater than capital expenditures. While the average level of regional expenditure efficiency of Southeast Sulawesi Province during 2016–2020 is 93% which is quite efficient.

## 1. Pendahuluan

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014), penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; sebagai hasil dari desentralisasi, pemerintah provinsi dan kota dibentuk dan diatur sebagai daerah otonom. Otonomi daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk membuat keputusan daerah yang luas tentang pengelolaan sumber daya sejalan dengan keputusan, prioritas, dan kapasitas daerah (Hadisantoso et al., 2020). Oleh karena itu kesiapan pemerintah daerah menjadi prioritas utama dalam menjalankan otonomi daerah khususnya dalam mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk menghasilkan serta mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat (Halim & Iqbal, 2012).

Salah satu unsur yang dinilai adalah kompetensi pengelolaan dana daerah sesuai Permendagri 59 Tahun 2007. Pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap masa depan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang di sertai pengelolaan asset daerah tidak hanya melibatkan sumber daya manusia, akan tetapi juga modal ekonomi yang terkelola dengan baik, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah direncanakan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang berperan besar dalam menahan kinerja, baik secara internal maupun dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Labi (2019) kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perbandingan komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Menurut Permendagri nomor 32 tahun 2008, APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk pemerintah daerah di Indonesia. APBD ditetapkan dalam undang-undang daerah, dan tahun anggaran APBD adalah satu tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Analisis kinerja keuangan dalam APBD dilakukan dengan membandingkan hasil dari satu periode ke periode sebelumnya secara berurutan (Pilat & Morasa, 2017).

Penelitian ini menyajikan ringkasan kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Lima tahun terakhir dipilih karena penelitian ini membutuhkan beberapa tahun perbandingan untuk mendapatkan kesimpulan tentang implementasi atau realitas APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Para peneliti sebelumnya telah melakukan kajian ekstensif tentang analisis kinerja dan realisasi APBD secara umum, seperti Labi (2019) yang melakukan penelitian di Kabupaten Pulau Morotai dengan menggunakan analisis data APBD 2013-2015. (Tulangow et al., 2019) melakukan penelitian serupa di Kabupaten Minahasa dengan menganalisis data APBD 2013-2014. Setelah itu, (Honga & Illat, 2014) melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan APBD di Kota Bitung selama tahun anggaran 2013.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan penelitian adalah "Bagaimana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020?" Sedangkan nilai dari penelitian ini adalah dapat membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui pelaksanaan

APBD, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Jenis dan Sumber Data

Analisis menggunakan data kuantitatif dari APBD dan laporan realisasi anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2016-2020. Studi ini mengandalkan data sekunder, yang dikumpulkan dari sumber lain atau melalui makalah (Kualitatif dan R&D. Sugiyono, 2017).

### 2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, yaitu dengan menghitung data keuangan yang terdapat dalam APBD dan LRA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2016 - 2020 yang diperoleh, untuk menganalisis permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Rumus untuk menghitung kinerja APBD adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

#### a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Rumus =  $\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah} - \text{Anggaran Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}}$

**Tabel 1.** Kriteria Varians Pendapatan Daerah

Kriteria	Ukuran
Baik	Realisasi Pendapatan > Anggaran Pendapatan
Kurang Baik	Realisasi Pendapatan < Anggaran Pendapatan

Sumber: (Mahmudi, 2010).

#### b. Analisis Derajat Desentralisasi

Rumus =  $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

**Tabel 2.** Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi

Kriteria	Ukuran (%)
Sangat Kurang	< 10
Kurang	10,1 – 20
Sedang	20,1 – 30
Cukup	30,1 – 40
Baik	40,1 – 50
Sangat Baik	> 50

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (Bisma et al., 2010).

#### c. Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Rumus =  $\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

**Tabel 3.** Kriteria Penilaian Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Kriteria	Ukuran (%)
Sangat Kurang	< 10
Kurang	10,1 - 20
Sedang	20,1 – 30
Cukup	30,1 – 40
Tinggi	40,1 – 50
Sangat Tinggi	> 50

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (Bisma et al. (2010).

d. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer dan Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 4.** Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kriteria	Ukuran (%)
Rendah Sekali	< 25
Rendah	25,1 - 50
Sedang	50,1 – 75
Tinggi	75,1 – 100

Sumber: (Halim, 2014).

e. Analisis Efektifitas PAD

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 5.** Kriteria Penilaian Tingkat Efektifitas PAD

Kriteria	Ukuran (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	< 75

Sumber: (Mahmudi, 2010).

f. Analisis Varians Belanja

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah} - \text{Anggaran Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 6.** Kriteria Varians Belanja

Kriteria	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber: (Mahmudi, 2010).

g. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

**Tabel 7.** Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja

Kriteria	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: (Mahmudi, 2010).

#### h. Analisis Keserasian Belanja

##### 1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

##### 2) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 8.** Kriteria Penilaian Keserasian Belanja

Kriteria	Ukuran (%)
Serasi	60 – 90 (Belanja Operasi)
Kurang Serasi	< 60 atau >90 (Belanja Operasi)
Serasi	5 – 20 (Belanja Modal)
Kurang Serasi	< 5 atau > 20 (Belanja Modal)

Sumber: (Mahmudi, 2010).

#### i. Analisis Efisiensi Belanja

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 9.** Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja

Kriteria	Ukuran (%)
Tidak Efisien	> 100
Efisien	< 100

Sumber: (Mahmudi, 2010).

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis varians pendapatan daerah merepresentasikan usaha suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang telah dianggarkan (Budidarma, 2010). Hasil dari perhitungan varians pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 10.** Hasil Analisis Varians Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Realisasi	Anggaran	Selisih	Kriteria
				Baik
2016	2,807,076,756,255	2,641,119,191,028	165,957,565,227	
2017	3,534,627,021,770	3,545,198,442,343	(10,571,420,573)	Kurang Baik
2018	3,785,562,578,471	3,521,771,323,096	263,791,255,375	Baik

2019	4,166,543,383,146	4,029,396,384,379	137,146,998,767	Baik
2020	4,012,335,036,317	4,432,855,469,479	(420,520,433,162)	Kurang Baik

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 10, kajian varians pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dinilai memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian pendapatan daerah yang melebihi target atau APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016, 2018, dan 2019. Temuan tersebut menandakan bahwa kinerja pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan mampu memenuhi anggaran pendapatannya. Meskipun pada tahun 2017 dan 2020, pemeriksaan variasi pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara dirasa kurang memuaskan karena realisasi pendapatan lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan. Hal ini disebabkan oleh administrasi PAD yang tidak efisien, yang mengakibatkan rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, terutama dalam hal pencapaian penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 dan tidak terealisasinya dana perimbangan pada tahun 2017.

### 3.2 Analisis Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Hasil dari perhitungan derajat desentralisasi adalah:

**Tabel 11.** Hasil Tingkat Derajat Desentralisasi Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	%	Kriteria
2016	753,657,954,464	2,807,076,756,255	27%	Sedang
2017	806,304,244,892	3,534,627,021,770	23%	Sedang
2018	903,949,000,785	3,785,562,578,471	24%	Sedang
2019	1,128,441,587,992	4,166,543,383,146	27%	Sedang
2020	1,017,138,016,007	4,012,335,036,317	25%	Sedang

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan derajat desentralisasi yang dihitung pada Tabel 11, Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih minim dan terbatasnya keterlibatan PAD atau kemampuan keuangan daerah dalam membiayai operasional pemerintah sendiri, daerah tetap sangat bergantung pada dana perimbangan anggaran negara (APBN). Rendahnya kontribusi PAD disebabkan oleh belum efektifnya pemungutan pajak daerah dan ketidakmampuan daerah mengelola pendapatan daerahnya sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### 3.3 Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berikut ini tabel perhitungan rasio ketergantungan:

**Tabel 12.** Hasil Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	%	Kriteria
2016	2,053,418,801,791	2,807,076,756,255	73%	Sangat Tinggi
2017	2,728,322,776,878	3,534,627,021,770	77%	Sangat Tinggi
2018	2,881,613,577,686	3,785,562,578,471	76%	Sangat Tinggi
2019	3,038,101,795,154	4,166,543,383,146	73%	Sangat Tinggi
2020	2,995,197,020,310	4,012,335,036,317	75%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 12, tingkat ketergantungan Provinsi Sulawesi Tenggara berfluktuasi rata-rata 75%, menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan dianggap cukup tinggi. Hal ini disebabkan besarnya uang transfer yang diterima APBN, khususnya DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Temuan ini mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kuatnya ketergantungan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pemerintah pusat akan berdampak pada rendahnya kemandirian daerah provinsi dalam hal pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

### 3.4 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat perbandingan antara PAD dengan Pendapatan Transfer yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Berikut ini merupakan tabel perhitungan rasio kemandirian daerah:

**Tabel 13.** Hasil Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer dan Pinjaman	%	Kriteria
2016	753,657,954,464	2,504,014,139,940	30%	Rendah
2017	806,304,244,892	3,226,990,347,898	25%	Rendah
2018	903,949,000,785	3,234,269,327,767	28%	Rendah
2019	1,128,441,587,992	3,544,218,236,294	32%	Rendah
2020	1,017,138,016,007	3,558,690,644,400	29%	Rendah

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 13 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tingkat kemandirian yang rendah dengan pola hubungan konsultatif, yang menyiratkan bahwa intervensi pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan kebijakan daerah. otonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara semakin mampu melaksanakan

otonomi daerah, dengan peran pemerintah berangsur-angsur berkurang berpihak pada pemerintah daerah. Rendahnya rasio kemandirian disebabkan PAD Provinsi Sulawesi Tenggara masih rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer. Minimnya kemandirian Provinsi Sulawesi Tenggara akan berdampak pada tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebab, PAD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak bisa diandalkan untuk melayani masyarakat dan terus mengandalkan pendapatan transfer.

### 3.5 Analisis Efektifitas PAD

Rasio Efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut hasil perhitungan tingkat Efektifitas PAD:

**Tabel 14.** Hasil Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	%	Kriteria
2016	753,657,954,464	558,392,945,028	135%	Sangat Efektif
2017	806,304,244,892	743,891,514,197	108%	Sangat Efektif
2018	903,949,000,785	620,402,707,096	146%	Sangat Efektif
2019	1,128,441,587,992	905,235,112,379	125%	Sangat Efektif
2020	1,017,138,016,007	1,224,218,532,479	83%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 14, rasio efektivitas PAD seringkali tergolong sangat berhasil karena rata-rata 119 % atau lebih. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki skor efikasi sangat efektif lebih besar dari 100% dari tahun 2016 hingga 2019, menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat efektif dalam menyelidiki dan mengendalikan PAD. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Hadisantoso, dkk (2020) yang menemukan bahwa efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara sangat efektif dengan penggunaan biaya yang relative sedikit dengan output realisasi anggaran yang optimal. Namun, pada tahun 2020, efisiensi PAD akan kurang dari 100%, sebesar 83 %, karena penerimaan pajak daerah yang tidak mencukupi dan pengelolaan yang tidak efisien dari potensi daerah yang sebenarnya untuk meningkatkan PAD.

### 3.6 Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan selisih antara anggaran belanja dan realisasi belanja. Berikut ini tabel perhitungan analisis varians belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara:

**Tabel 15.** Hasil Varians Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Realisasi	Anggaran	Selisih	Kriteria
2016	2,663,870,374,406		(104,892,127,554)	Baik



		2,768,762,501,959		
2017	3,554,111,159,552	3,597,160,276,734	(43,049,117,182)	Baik
2018	3,586,474,436,543	3,560,113,603,424	26,360,833,119	Kurang Baik
2019	4,128,549,681,525	4,245,329,144,386	(116,779,462,861)	Baik
2020	4,198,430,219,113	5,757,129,238,435	(1,558,699,019,322)	Baik

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 15, analisis varians belanja daerah secara umum berdasarkan kriteria penilaian Mahmudi (2010) menunjukkan bahwa kinerja belanja Provinsi Sulawesi Tenggara dapat tergolong baik, artinya provinsi tersebut mampu memanfaatkan dan mengendalikan anggaran belanja. agar tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2018, variasi belanja melebihi anggaran, karena adanya peningkatan belanja barang dan jasa, serta penanaman modal, yang dibarengi dengan peningkatan belanja bagi hasil dan dukungan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa.

### 3.7 Analisis Pertumbuhan Belanja

Hasil perhitungan atau analisis pertumbuhan belanja Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun anggaran 2016 sampai 2020 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 16.** Hasil Pertumbuhan Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Realisasi t	Realisasi t-1	%	Kriteria
2016	2,663,870,374,406	-	0%	-
2017	3,554,111,159,552	2,663,870,374,406	33%	Positif
2018	3,586,474,436,543	3,554,111,159,552	1%	Positif
2019	4,128,549,681,525	3,586,474,436,543	15%	Positif
2020	4,198,430,219,113	4,128,549,681,525	2%	Positif

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan temuan perhitungan rasio pertumbuhan pada Tabel 16, pertumbuhan belanja Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara umum cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif sebesar 13%. Tingkat kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 33%, sedangkan tingkat kenaikan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 1%. Dengan demikian, yang diukur dari pertumbuhan belanja, kinerja anggaran dan realisasi belanja daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2016-2020 tumbuh atau positif.

### 3.8 Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja daerah bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan alokasi dana belanja daerah. Berikut ini tabel perhitungan tingkat keserasian belanja daerah Kabupaten Morowali:

**Tabel 17.** Hasil Analisis Keserasian Belanja atas Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja	%	Kriteria
2016	1,574,546,685,240	2,663,870,374,406	59%	Kurang Serasi
2017	2,316,456,949,024	3,554,111,159,552	65%	Serasi
2018	2,456,548,906,760	3,586,474,436,543	68%	Serasi
2019	2,548,945,885,374	4,128,549,681,525	62%	Serasi
2020	2,692,850,494,992	4,198,430,219,113	64%	Serasi

Sumber: Data diolah, 2021.

Pengeluaran operasional adalah pengeluaran yang manfaatnya digunakan dalam satu tahun anggaran, membuatnya bersifat sementara dan, dalam situasi tertentu, rutin dan berulang. Biaya pegawai, biaya produk dan jasa, biaya bunga, hibah dan bantuan sosial semuanya termasuk dalam kategori biaya operasional. Berdasarkan tabel 17, antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, penetapan belanja operasional untuk belanja daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah selaras dan seimbang menurut kriteria (Mahmudi, 2010), dengan rata-rata lebih dari 60% atau 64 %.

**Tabel 18.** Hasil Analisis Keserasian Belanja atas Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	%	Kriteria
2016	751,917,122,616	2,663,870,374,406	28%	Kurang Serasi
2017	903,121,911,901	3,554,111,159,552	25%	Kurang Serasi
2018	795,197,262,263	3,586,474,436,543	22%	Kurang Serasi
2019	1,194,738,481,989	4,128,549,681,525	29%	Kurang Serasi
2020	1,048,329,030,395	4,198,430,219,113	25%	Kurang Serasi

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 18, pemeriksaan kesesuaian belanja modal dengan belanja daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak meyakinkan, karena proporsi rata-rata belanja modal provinsi melebihi 20%, atau 26%, menurut kriteria (Mahmudi, 2010). Pemerintah daerah dengan pendapatan daerah yang rendah seringkali menghabiskan lebih banyak anggarannya untuk proyek-proyek modal daripada pemerintah daerah dengan pendapatan daerah yang tinggi. Ini karena pemerintah daerah berpenghasilan rendah lebih cenderung terlibat dalam belanja modal aktif sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah berpenghasilan tinggi sering kali memiliki aset modal yang cukup. Dengan demikian, PAD Provinsi Sulawesi Tenggara masih rendah.

### 3.9 Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Berikut ini tabel analisis efisiensi belanja daerah:

**Tabel 19.** Hasil Analisis Efisiensi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun	Realisasi	Anggaran	%	Kriteria
2016	2,663,870,374,406	2,768,762,501,959	96%	Efisien

2017	3,554,111,159,552	3,597,160,276,734	99%	Efisien
2018	3,586,474,436,543	3,560,113,603,424	101%	Tidak Efisien
2019	4,128,549,681,525	4,245,329,144,386	97%	Efisien
2020	4,198,430,219,113	5,757,129,238,435	73%	Efisien

Sumber: Data diolah, 2021.

Seperti terlihat pada Tabel 19, efektivitas belanja daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara bervariasi dari tahun ke tahun. Menurut (Mahmudi, 2010), tingkat efisiensi belanja di Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai kategori tidak efisien pada tahun 2018. Namun, pada tahun-tahun lain rasio efisiensinya kurang dari 100%, dengan rata-rata 93 %. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara telah efektif mengelola belanja daerah atau tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran.

#### 4. Kesimpulan

Secara umum rasio pertumbuhan belanja telah menunjukkan pertumbuhan yang baik dan positif. Hal ini dapat dilihat dari 10 analisis kinerja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016-2020 antara lain analisis terhadap varians pendapatan, derajat desentralisasi, ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD, varians, pertumbuhan, dan keserasian belanja, efisiensi belanja serta analisis keserasian belanja untuk analisis belanja modal terhadap belanja daerah. Analisis kinerja pendapatan daerah dilihat dari analisis varians pendapatan, secara umum tergolong baik. Dimana realisasi pendapatan daerah melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sedangkan apabila dilihat dari analisis derajat desentralisasi, secara umum tergolong sedang, dengan rasio rata-rata sebesar 25%. Dari hasil analisis ketergantungan keuangan daerah, secara umum tergolong sangat tinggi, dengan rasio rata-rata sebesar 75% sebaliknya jika dilihat dari analisis kemandirian keuangan daerah, secara umum tergolong rendah, dengan rasio rata-rata sebesar 29% dengan pola hubungan konsultatif. Dilihat dari analisis efektifitas PAD, analisis kinerja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum tergolong sangat efektif dengan rasio rata-rata sebesar 119%.

Dilihat dari analisis varians belanja terhadap kinerja belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, secara umum tergolong Baik, dimana realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, sementara itu jika analisis kinerja belanja daerah dilihat dari analisis pertumbuhan belanja, secara umum juga tergolong positif dengan rasio rata-rata sebesar 13%. Hasil Analisis keserasian belanja untuk analisis belanja operasi terhadap belanja daerah tergolong serasi, dengan rasio rata-rata sebesar 64%, sebaliknya jika dilihat dari analisis keserasian belanja untuk analisis belanja modal terhadap belanja daerah, secara umum tergolong kurang serasi, dengan rasio rata-rata sebesar 26%, sementara itu, analisis efisiensi belanja tergolong efisien dengan rasio rata-rata sebesar 93%.

**Daftar Pustaka**

- Bisma, Gede, I. D., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus*, 4(3).
- Budidarma. (2010). *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*. Erlangga Group.
- Hadisantoso, E., Awaluddin, I., & Nuka, M. (2020). Evaluasi Penentuan Tarif Kamar Hotel dengan Menerapkan Metode Activity Based Costing pada Hotel Zenith Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 106–121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/jak-uho.v5i1.13405>
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Negara*. Bulak Sumur.
- Honga, A. ., & Illat, V. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 2(4), 278–288.
- Kualitatif dan R&D. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Labi, A. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1355–1370.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga Group.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, (2014).
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *ACCOUNTABILITY*, 6(1), 45–56.
- Tulangow, C., Santoso, P., & Lukas, A. Y. H. (2019). Effect of feeding frequency of trash fish on growth of mangrove crab (*Scylla serrata*) Used battery system. Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana. 50-61p). *Aquatik*, 2(2), 50–61.